BAB IV
STRATEGI DIPLOMASI UNI EROPA DALAM MENANGANI PROLIFERASI NUKLIR IRAN

Bab IV berisi tentang jawaban dari rumusan masalah skripsi yang disebutkan dalam bab I. Pembahasan di bab IV diawali dengan penjelasan mengenai sikap Uni Eropa dalam menangani proliferasi nuklir Iran. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi diplomasi Uni Eropa serta penjelasan mengenai bagaimana langkah yang diambil Uni Eropa sehingga mampu mempengaruhi proses penyelesaian permasalahan terkait masalah non proliferasi nuklir Iran hingga pencapaian Uni Eropa.

A. SIKAP UNI EROPA DALAM MENANGANI PROLIFERASI NUKLIR IRAN

Dalam menangani proliferasi nuklir Iran, Uni Eropa memiliki pendekatan sikap yang berbeda dengan Amerika Serikat dan juga beberapa negara yang tergabung dalam P5+1. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang diyakini oleh masing-masing pihak dalam upayanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diplomasi China yang berpengaruh dalam perundingan P5 + 1 berpusat pada strategi lama terhadap Iran. Tujuan China secara bertahap tumbuh dengan Iran merupakan bentuk kemitraan multi dimensi yang didasarkan pada kepercayaan dan melihat Iran yang potensial dapat bertindak sebagai mitranya di Asia di mana banyak orang melihat kebangkitan China sebagai ancaman. China mengeksploitasi peran gandanya sebagai salah satu mitra Iran dan anggota tetap Dewan Keamanan serta berfungsi sebagai penjaga gerbang de facto untuk sanksi internasional yang signifikan terhadap ambisi nuklir Iran (Garver, 2009).

Sehubungan dengan sikap China, Rusia yang memiliki sejarah dalam pembelian persenjataan dan pemasok bahan bakar energi nuklir pada 1990-an, setelah pecahnya Uni Soviet. Rusia menjadi salah satu benteng terdepan yang digunakan Iran dalam memulai program proliferasi nuklirnya (Thowhidul).

Rusia membuat perbedaan antara apa yang dianggapnya sebagai kerjasama nuklir yang sah dan peringatan yang diberikan bagi keamanan program nuklir Iran. Pemerintahan Putin oleh karena itu menekankan hak Iran untuk mendapatkan tenaga nuklir.

Hubungan Rusia dengan Iran sama-sama kooperatif dan kompetitif (Witold Rodkiewicz, 2015). Rusia belum terkait erat dengan Iran seperti China, namun juga tidak secara konsisten mendukung Amerika Serikat dan Eropa dalam menangani Iran. Perhitungan Rusia jelas realis dan kebijakannya terhadap masing-masing pihak berfluktuasi sesuai dengan risiko dan manfaat yang relatif akan diterima. Rusia pada awalnya merupakan fasilitator penting kapasitas nuklir Iran, memberikan bantuan teknis untuk pembangunan reaktor nuklir Bushehr, namun sejak saat itu hubungan tersebut telah dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan Iran dengan Barat serta memanasnya hubungan.

Rusia dan China adalah dua lawan bicara utama dalam negosiasi mengenai Iran (Pieper, 2014). Uni Eropa dan Rusia memiliki rasa tanggung jawab global terhadap non-proliferasi yang terutama diterjemahkan melalui konsultasi bilateral reguler mereka mengenai masalah ini. Rusia telah menentang sanksi terhadap Iran. Dengan nada yang sama, China secara konsisten menentang sanksi atau sikap yang lebih kuat terhadap posisi Iran. Dengan kata-kata diplomatik, Uni Eropa dan China menghargai hak milik Iran.

Partisipasi Uni Eropa sejauh ini berupaya untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur diplomatik berupa dialog mulitilateral. Dalam sistem multilateral, partisispasi Uni Eropa adalah bagian dari kebutuhan fungsional dan aspirasi umum (Mae, 2012). Kebutuhan itu berasal dari kebutuhan akan perwakilan eksternal mengenai isu-isu dimana Uni Eropa memiliki kebijakan bersama, sedangkan aspirasi tersebut merupakan hasil komitmen ideasional Uni Eropa terhadap

multilateralisme. Baik kebutuhan dan aspirasi berulang kali diungkapkan sepanjang Perjanjian Lisbon.

Asal usul komitmen dan aspirasi ideasional ini sering dikaitkan dengan pengalaman historis Eropa tentang nasionalisme dan kedaulatan nasional yang tak berujung yang berpuncak pada dua perang dunia dan hakikat Uni Eropa sendiri sebagai sistem multilateral yang sangat dilembagakan. Oleh karena itu, para ilmuwan berpendapat bahwa *"Komitmen Uni Eropa terhadap pendekatan multilateral dapat dilihat sebagai bagian dari DNA-nya"* (Forsch, 2017). Selain itu, partisipasi dan keterwakilan eksternal merupakan komponen penting untuk memberikan pengaruh internasional, dan karena kurangnya kekuatan kerasnya, sistem multilateral berbasis peraturan sesuai dengan kepentingan strategis Uni Eropa.

Uni Eropa telah menjalin hubungan yang erat dan metode kerja praktis untuk terlibat dalam pemerintahan global. Status di organisasi internasional bervariasi antara keanggotaan penuh (misalnya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)) dan Pengamat (PBB). Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki metode yang sangat beragam untuk mencapai tujuan mereka. Seperti yang telah dicantumkan dalam prinsip dasar keamaan Uni Eropa dimana adanya perbedaan pendekatann antara ESS dan USNSS (Julia Klohs, 2014).

Amerika melalui USNSS menekankan pentingnya solusi keras dan militer. Hal ini berdasarkan pilihan untuk bertindak secara sepihak dan pre-emptive jika perlu. Sedangkan ESS mencerminkan pendekatan komprehensif yang berfokus pada seperangkat instrumen yang luas dan menerapkan pendekatan pencegahan dan multilateral, sehingga menunjukkan pentingnya institusi internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini juga cenderung menekankan solusi soft power yang mengintegrasikan sumber daya diplomatik, ekonomi dan militer. Singkatnya, Pendekatan USNSS dapat dicirikan secara sepihak dan preemptive,

sedangkan pendekatan ESS dapat digambarkan secara multilateral dan mengandung unsur pencegahan.

Amerika Serikat dapat melakukan tindakan sepihak sepihak jika perlu. Hal ini dikutip dari draft USNSS yang menyatakan *"Dalam menjalankan kepemimpinan kita, kita akan menghormati nilai, penilaian, dan kepentingan teman dan mitra kita. Namun, kita akan siap untuk bertindak terpisah bila kepentingan dan tanggung jawab unik kita memerlukan"*. Jalan ini juga mencakup prosedur pre-emptive: "sebagai masalah akal sehat dan pembelaan diri, Amerika akan bertindak melawan ancaman yang muncul sebelumnya sebelum mereka terbentuk sepenuhnya".

Pre-emption bersifat fundamental dan tema yang berulang dalam USNSS: "Kami tidak akan ragu untuk bertindak sendiri, jika perlu untuk menjalankan hak pembelaan diri dengan bertindak secara pre-emptive terhadap teroris semacam itu, untuk mencegah mereka melakukan tindakan yang merugikan terhadap kami. orang dan negara kita". Pre-emption tidak dapat ditemukan di ESS, tapi "pencegahan". Namun bertentangan dengan USNSS, tindakan pencegahan terutama dimaksudkan dengan cara non-militer di ESS, seperti yang digambarkan dalam pernyataan ini: "Kita harus siap untuk bertindak sebelum terjadi krisis. Pencegahan konflik dan pencegahan ancaman tidak dapat dimulai terlalu dini".

Pendekatan sepihak dan *pre-emptive* secara alami memberi peran terbatas terhadap undang-undang internasional dan organisasi internasional dari sudut pandang USNSS. Hal ini didasari dari draft USNSS berupa "Amerika Serikat berkomitmen terhadap institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Negara-Negara Amerika, dan NATO serta aliansi lama lainnya. Koalisi baru yang mau berkoalisis dengan Amerika dapat dibuat dengan menambah institusi permanen lainnya". Bertentangan dengan Uni Eropa yang menyatakan tujuan "memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa". Dapat dipahami bahwa Amerika Serikat

hanya menginginkan agar dapat bertahan bersama dan jika PBB atau organisasi internasional lainnya tidak bekerja untuk tujuan Amerika maka secara spesifik koalisi yang mau dan baru harus dibentuk.

Meskipun Uni Eropa dan Amerika Serikat sering merujuk pada pendekatan multilateral, mereka jelas memiliki interpretasi multilateralisme yang beragam seperti yang telah terlihat pada perbandingan sebelumnya. Sementara Uni Eropa berkomitmen untuk melakukan upaya internasional dalam kerangka organisasi internasional, seperti PBB, Amerika Serikat menerapkan konsep multilateralisme yang lebih luas yang juga diberikan dalam koalisi negara-negara secara individual dan ad hoc. UNSS menunjukkan bahwa Amerika harus membalikkan hak untuk bertindak secara sepihak jika perlu untuk mempertahankan kepentingan nasional dan kepentingan negaranya. Ada perubahan dimana saat ini makna dari pre-empetive dalan UNSS bukan sebaai tindakan yang didahului tetapi lebih kepada pencegahan, namun hal tersebut hingga saat ini tidak secara signifikan dapat diperlihatankan Amerika.

Pendekatan yang berbeda dari Amerika dan Uni Eropa ini disorot oleh Juru Bicara Hubungan Eksternal Komisi Eropa dengan kata-kata, "Tujuan demokrasi di negara-negara ini adalah yang kita bagi dengan orang Amerika. Kami memiliki cara yang berbeda untuk mewujudkannya, tentang menerapkan kebijakan mereka”. Argumen Uni Eropa adalah bahwa penerapan sanksi sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini tidak dapat menjadi produktif. Sehubungan dengan tingkat keterlibatan Uni Eropa, strategi non-proliferasi menawarkan pendekatan berlapis-lapis berdasarkan multilateralisme yang efektif, promosi lingkungan regional dan global yang stabil dan, akhirnya kerja sama yang erat dengan negara lain atau organisasi.

Pendekatan berlapis-lapis ini lebih khusus lagi dimensi multilateralnya telah digambarkan sebagai hal yang inovatif dan berbeda oleh Uni Eropa.Bagi pihak lain, bagaimanapun keseimbangan Uni Eropa antara bilateralisme dan multilateralisme, kekuatan lunak dan keras, adalah pertanda bahwa setidaknya di bidang non-proliferasi Uni Eropa adalah "normative power". Pendekatan multilateral Uni Eropa bersifat fleksibel. Ini bergantung secara simultan pada multilateralisme tipis (atau informal) dan tebal (atau peraturan dan mengikat hukum). Di mata pembuat kebijakan Eropa, multilateralisme yang efektif tetap menjadi tujuan jangka panjang, namun bukan satu-satunya jalan menuju dunia yang aman dari nuklir.

Preferensi Amerika Serikat terutama menggunakan embargo ekonomi dan sanksi diplomatik digambarkan sebagai tongkat utama yang dapat digunakan untuk meyakinkan Iran agar mengubah kebijakannya sedangkan preferensi Uni Eropa adalah menggunakan kartu perdagangan dan kerjasama digambarkan dalam bentuk sebuah wortel. Dengan kata lain, Uni Eropa memilih kebijakan yang lebih multilateral dan perdagangan sedangkan Amerika memilih isolasi dan sanksi untuk mengubah kebijakan Iran.

Keberhasilan multilateralisme tidak dinilai hanya dari perspektif normatif murni multilateralisme sebagai tujuan itu sendiri tetapi juga dari segi efektivitas dan kemajuan tujuan Uni Eropa. Kepentingan Uni Eropa tidak harus terlalu sempit didefinisikan. Kontradiksi antara nilai dan minat material menjadi perhatian umum pembuat kebijakan dan analis Uni Eropa. Bila nilai yang dipertaruhkan adalah promosi multilateralisme, kontradiksi ini seringkali lebih nyata. Bila dilihat dalam perspektif yang lebih luas, baik waktu maupun isu, mempromosikan kerangka kerja multilateral dengan mengorbankan beberapa kepentingan langsung material adalah rasional.

Konteks berbasis norma yang menghasilkan kebijakan multilateral merupakan lingkungan yang lebih baik bagi Uni Eropa daripada politik minyak mentah yang menguji kohesi dan hampir selalu menempatkan Uni Eropa pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah satu pelajaran yang telah diketahui oleh negara-negara anggota Uni Eropa dari keterlibatan mereka sendiri dalam integrasi Eropa.

B. DIPLOMASI UNI EROPA MENANGANI PROLIFERASI NUKLIR IRAN

Uni Eropa dikenal sebagai salah satu organisasi internasional yang menggunakan pendekatan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan beberapa masalah. Uni Eropa juga berkontribusi besar dalam kemajuan diplomasi antara kelompok P5+1 dan Iran. Diplomasi yang diselenggarakan secara formal dalam bentuk negosiasi bersama. Hal ini didukung dengan perubahan peran Perwakilan Tinggi Uni Eropa yang baru sehingga memberikan pengaruh positif bagi proses negosiasi yang sedang dilakukan.

Upaya untuk menemukan solusi diplomatik terhadap perselisihan mengenai program nuklir Iran merupakan tindakan paling ambisius dan tinggi yang diambil oleh Uni Eropa sampai saat ini di bidang non-proliferasi. Iran yang memiliki senjata nuklir yang bisa memiliki implikasi serius terhadap keamanan regional dan global serta upaya global untuk mencegah penyebaran lebih lanjut terhadap senjata nuklir. Serangan militer untuk mencegah atau setidaknya menunda Iran memperoleh senjata nuklir akan meningkatkan ketegangan regional dan mungkin berakibat pada konflik militer yang lebih luas.

Uni Eropa telah mengambil keputusan dalam menemukan jalan damai dari kebuntuan tentang program nuklir Iran selama lebih dari 12 tahun. Puncak dari upaya yang dilakukan Uni Eropa dapat dilihat pada tahun 2013 – 2015. Uni Eropa telah menginvestasikan cukup banyak energi politik dan sumber daya ekonomi agar mencapai penyelesaian yang

komprehensif dan dinegosiasikan dalam bentuk jangka panjang sehingga dapat mengembalikan kepercayaan internasional akan sifat damai program nuklir Iran, namun tetap menghormati hak sah Iran dalam penggunaan energi nuklir secara damai di bawah Perjanjian Non Proliferasi. Peran Uni Eropa ditandai oleh motif kuat untuk melanjutkan perundingan dan upaya besar yang telah diinvestasikan untuk menjaga agar inisiatif perundingan tetap berjalan.

Dalam menanggapi krisis nuklir Iran, negara-negara anggota Uni Eropa percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah cara terbaik untuk mencapai sebuah kesepakatan, setidaknya pada bagian pertama dari intervensi mereka diikuti oleh sanksi multilateral yang diselesaikan dengan sanksi sepihak. Selama intervensi, Uni Eropa memberikan perhatian khusus pada posisi Badan Energi Atom Internasional, Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional. Keterlibatan Uni Eropa telah menjadi dasar penghormatan dan juga untuk mempertahankan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir. Instrumen ini tidak dapat dianggap rasional namun merupakan konsekuensi dari identitas internasional Uni Eropa.

Upaya Uni Eropa untuk menyelesaikan konflik dimulai dalam keadaan luar biasa. Ketika Uni Eropa mulai menangani program nuklir Iran, ia juga mengembangkan pendekatan yang lebih aktif dan koheren terhadap masalah keamanan termasuk pengendalian senjata dan non-proliferasi. Uni Eropa terus melakukan upaya negosiasi dengan mengadakan beberapa kali pertemuan baik secara bilateral dengan Iran maupun multilateral dengan kelompok P5 + 1. Negosiasi adalah urutan tahapan yang menggabungkan resolusi konflik dan kerjasama dengan komunikasi. Prosesnya dapat didefinisikan sebagai pola interaksi para aktor tergantung pada strategi dan konteksnya. Negosiasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah melalui diplomasi.

Upaya diplomatik dengan menggarisbawahi metode *effective multilaterism*, Uni Eropa dan Kebijakan Luar Negeri

dan Keamanan Bersama telah diberi kesempatan untuk membuktikan keefektifannya dalam manajemen krisis, kerja sama dan keterlibatan dalam menangani masalah luar negeri yang serius dan kompleks. Dengan cara effective multilaterism melalui respon Uni Eropa terhadap masalah non-proliferasi dengan sebuah pendekatan keamanan multilateral untuk keamanan, termasuk perlucutan senjata dan non-proliferasi, memberikan cara terbaik untuk mempertahankan tatanan internasional yang dibuat dari kombinasi tekanan diplomatik, tindakan pemaksaan dan juga tindakan lunak seperti penawaran keamanan dan teknologi nuklir bebas untuk tujuan damai.

Sejak awal krisis nuklir, Uni Eropa menolak preferensi Amerika untuk menggunakan kekuatan dalam meyakinkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Ini adalah konsekuensi dari kenyataan bahwa negara anggota Uni Eropa memiliki preferensi untuk menggunakan cara-cara non militer dan soft power saat menangani masalah negara. Uni Eropa pada intinya adalah kekuatan normatif di masyarakat internasional dengan menggunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan preferensinya dalam mempengaruhi hubungan internasional melalui norma dan bukan kekerasan. Untuk kekuatan Uni Eropa digunakan secara ketat untuk perdamaian dan tidak untuk kepentingannya sendiri. Penolakan solusi militer tersebut ditegaskan kembali oleh institusi Eropa, Parlemen Eropa yang menyatakan bahwa opsi militer tidak boleh dipertimbangkan untuk menyelesaikan krisis. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya pilihan alternatif untuk Eropa adalah melalui kekuatan gagasan yang diimplementasikan kedalam metode hubungan diplomatik (Lasan, 2014).

Uni Eropa dalam hal ini lebih mengupayakan dilakukannya diplomasi preventif. Diplomasi preventif telah menjadi semacam kata kunci di bidang keamanan internasional yang sering kali digunakan bersamaan dengan terminologi seperti pencegahan konflik maupun pembangunan perdamaian struktural. Diplomasi preventif di sini dipahami sebagai metode diplomatik dan damai seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi

dan konsiliasi yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan sebelum menghasilkan konflik atau jika konflik pecah bertindak cepat untuk menahannya dan menyelesaikan penyebab utamanya. Manifestasinya yang paling umum dilakukan oleh Uni Eropa adalah mendorong dilaksanakannya dialog komprehensif multilateral secara kompromi dan berkelanjutan serta mengupayakan hasil kedalam bentuk resolusi yang damai.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa telah berfungsi sebagai negosiator utama dalam pembicaraan tersebut dan telah mendapat banyak pujian dari media internasional atas prestasi yang telah dicapai. Pernyataan bahwa Catherine Ashton dan Javier Solana memainkan peran mendasar dalam menengahi perselisihan antara Amerika dan Iran. Ashton digambarkan sebagai senjata rahasia diplomatik Uni Eropa yang berawal dari nol menjadi pahlawan dengan memainkan peran penting dalam diplomasi dunia.

Agenda eksternal Uni Eropa juga memiliki upaya pencegahan konflik yang kuat sejak awal. Diplomasi preventif secara eksplisit direkomendasikan dalam Komunikasi 1996 sebagai pendekatan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ketegangan yang meningkat melalui pembukaan dialog politik dengan pihak-pihak terkait. Aspirasi preventif kemudian diartikulasikan dalam Strategi Keamanan Eropa (ESS) tahun 2003 sebagai "kebutuhan untuk dapat bertindak sebelum negara-negara di sekitar kita memburuk, ketika tanda-tanda proliferasi terdeteksi, dan sebelum keadaan darurat kemanusiaan muncul. Keterlibatan preventif dapat menghindari masalah yang lebih serius di masa depan".

Anggota Uni Eropa menyatakan preferensi untuk menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan krisis nuklir Iran ditegaskan kembali dalam semua dokumen yang dikeluarkan oleh institusi Eropa sejak tahun 2003 dan seterusnya, bahkan ketika mengadopsi sanksi minyak terhadap Iran. Tujuan Uni Eropa terus menemukan solusi komprehensif dalam jangka panjang yang akan meningkatkan kepercayaan internasional

terhadap sifat damai program nuklir Iran, sekaligus menghormati hak sah Iran untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai menurut NPT.

Seluruh anggota Uni Eropa dan lembaga Uni Eropa memiliki tanggung jawab kolektif untuk mencegah risiko yang ditimbulkan dari proliferasi nuklir dengan secara aktif berkontribusi terhadap perang melawan proliferasi tersebut karena diplomasi tersebut membuka jalan baru menuju dunia yang lebih aman yang dapat diverifikasi sehingga memberikan hasil bahwa nuklir Iran sepenuhnya merupakan program nuklir yang damai dan membuktikan Iran tidak bisa membangun senjata nuklirnya. Kembali ditegaskan bahwasanya effective multilateralism merupakan landasan strategi Eropa untuk memerangi proliferasi WMD. Uni Eropa berkomitmen pada sistem perjanjian multilateral yang memberikan dasar hukum dan normatif untuk semua upaya non-proliferasi. Kebijakan Uni Eropa adalah untuk mengejar implementasi dan universalisasi norma perlucutan senjata dan non-proliferasi yang ada.

Uni Eropa percaya bahwa solusi politik untuk semua masalah yang berbeda di negara-negara yang berada pada wilayah paling berbahaya untuk proliferasi tidak akan mudah dicapai dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan Uni Eropa lebih kepada tindakan upaya pencegahan, menghalangi, menghentikan, dan jika memungkinkan menghilangkan program proliferasi yang menjadi perhatian, sambil menangani penyebab utamanya. Sumbangan multilateralisme lebih efektif dengan bertindak tegas terhadap proliferasi dan melaksanakan aksi diplomatik untuk mempromosikan kesepakatan multilateral.

Komitmen formal Uni Eropa terhadap multilateralisme pada umumnya semakin diperkuat dengan berlakunya Perjanjian Lisbon pada tanggal 1 Desember 2009. Pasal 21 (1), paragraf kedua, dari Perjanjian tentang Uni Eropa (TEU) sekarang secara eksplisit menyebutkan bahwa Perhimpunan dalam konteks hubungan eksternal “Harus mempromosikan

solusi multilateral untuk masalah umum, khususnya dalam kerangka PBB". Uni Eropa percaya bahwa solusi politik untuk semua masalah dapat dihadapi secara berbeda dan terkait masalah proliferasi tidak akan mudah dicapai dalam jangka pendek. Oleh karena itu kebijakan Uni Eropa lebih kepada upaya mencegah, menghalangi, menghentikan, dan jika memungkinkan menghilangkan program proliferasi yang menjadi perhatian sambil menangani penyebab utamanya.

Perwakilan Tinggi memimpin selama hampir semua negosiasi dengan memimpin kelompok P5+1 selama perundingan Iran selama 12 tahun, dari Solana pada tahun 2003 sampai Mogherini pada tahun 2015. Mereka telah menjadi negosiator terpenting antara Iran dan AS ketika hubungan mereka berada di fase terburuk dan juga menjembatani aspirasi negara-negara kelompok P5+1 Selama periode paling penting dalam pembicaraan Iran ketika mencapai ketegangan tinggi. Perwakilan Tinggi Uni Eropa, terutama Ashton datang dengan memberikan beberapa inisiatif untuk melanjutkan pembicaraan dan selalu menandakan komitmen Uni Eropa yang dicerminkan melalui kesiapan mereka untuk melanjutkan negosiasi.

Sebagaimana dicatat, peran Perwakilan Tinggi sangat penting selama proses berlangsung dan telah berkembang secara signifikan dari hubungan diplomatik. di Wina antara Iran, China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa. Uni Eropa secara keseluruhan termasuk dalam kesepakatan tersebut, karena diwakili oleh HR / VP. Selama negosiasi yang mengarah ke kesepakatan Iran yang memakan waktu lebih dari satu dekade, HR Javier Solana, Catherine Ashton dan Federica Mogherini telah menjadi aktor yang sangat signifikan.

Tindakan pencegahan politik dan diplomatik (perjanjian multilateral dan kontrol ekspor rezim) dan beralih ke organisasi internasional yang kompeten membentuk garis pertahanan pertama melawan proliferasi bagi Uni Eropa. Perwakilan Tinggi Uni Eropa sangat penting dalam

memperbaiki hubungan buruk antara AS dan Iran dan juga dalam perundingan dengan kelompok P5+1, yang terbukti penting dalam mencapai kesepakatan akhir pada tahun 2015. Karena kinerja efektif HR / VP dalam kasus Iran, Uni Eropa dapat menunjukkan kemungkinan untuk menjadi aktor berpengaruh dalam sistem internasional.

Pemerintah Uni Eropa dan negara-negara Eropa telah menanggapi secara positif seruan dari pemerintah baru Iran Hassan Rouhani untuk memperbaiki hubungan dan mempercepat pertukaran yang sebelumnya tidak aktif dengan Iran di seluruh sektor birokrasi. Catherine Ashton mengambil alih posisi Solana di tahun 2009 sebagai Perwakilan Tinggi Uni Eropa yang baru dengan memberi Uni Eropa wajah baru melalui kegiatan diplomatiknya. Sejak dasawarsa isolasi Iran berakhir pada tahun 2013 sebagian besar negara Uni Eropa telah mengirim menteri luar negeri mereka ke Iran dan secara resmi menerima menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.

Pada 5-6 April di Almaty Kazakhstan 2013, Iran dan kelompok P5 +1 mengadakan pembicaraan. Masing-masing pihak mengajukan proposal dalam perundingan tersebut, namun gagal mencapai konsensus sehingga tidak ada pertemuan lebih lanjut yang akan dijadwalkan. Negosiasi antara Iran dan kelompok P5 + 1 dilanjutkan di Jenewa pada tanggal 15-16 Oktober. Iran diwakili oleh tim perunding barunya, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Javad Zarif. Iran mengajukan sebuah proposal baru selama perundingan yang menggariskan kerangka luas untuk kesepakatan akhir yang komprehensif dan langkah-langkah spesifik untuk masing-masing pihak dalam mengambil kesepakatan tahap pertama.

Pada tanggal 24 November 2013, setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan, sebuah kesepakatan telah tercapai. Negosiator utama Iran dan Menteri Luar Negeri Javad Zarif dan Perwakilan Tinggi Kebijakan Luar Negri dan Keamanan Bersama Uni Eropa Catherine Ashton menandatangani proposal yang dikenal sebagai *Joint Plan of Action*, sebuah

kesepakatan sementara yang dimaksudkan untuk membuka jalan menuju solusi komprehensif. Selama fase awal, yang berlangsung selama enam bulan terakhir, Iran harus mengubah stok uranium yang diperkaya 20% menjadi bahan bakar untuk Reaktor Riset Tehran dan memungkinkan pemantauan ekstensif terhadap IAEA. Sebagai gantinya, kelompok P5+1 dan Uni Eropa akan menangguhkan sanksi tertentu dan tidak mengenakan sanksi baru. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 20 Januari 2014. Saat itu Iran menerapkan langkah-langkah nuklir berdasarkan kesepakatan JPOA dan Ashton menyatakan bahwa P5+1 akan mulai menangguhkan sanksi

Menurut Perwakilan Tinggi Uni Eropa Ashton. “Jika memungkinkan Uni Eropa harus berusaha mencegah konflik sebelum terjadi krisis atau kekerasan meletus kesepakatan tersebut adalah prioritas konstan dan tinggi bagi semua keterlibatan diplomatik Uni Eropa”. Ashton memperkenalkan gaya yang berbeda dengan negosiasi dengan Iran. Ashton lebih fokus pada diplomasi yang tenang. Ketika dilantiknya Rouhani sebagai pemimpin Iran yang baru, Ashton langsung meminta bantuan Menteri luar negeri Zarif, duta besar Iran agar dimulainya kembali negosiasi serius dengan Kelompok P5+1.

Negosiasi bertujuan untuk solusi komprehensif dimulai kembali pada tanggal 17-20 Februari 2014 di Wina, di mana agenda tersebut disusun. Setelah bertemu pada bulan Maret dan April, penyusunan kesepakatan komprehensif dimulai pada bulan Mei. Pada tanggal 19 Juli, satu hari sebelum batas akhir kesepakatan JPOA, para pihak sepakat untuk memperpanjang perundingan sampai 24 November, dan menggariskan langkah-langkah baru untuk implementasi.

Sementara Ashton digantikan oleh Mogherini. Mogherini menunjuk Ashton sebagai Penasihat Khusus untuk memfasilitasi perundingan nuklir dengan Iran untuk memastikan keberlanjutan negosiasi kesepakatan akhir. Kesepakatan Iran dimulai dengan diskusi bilateral antara AS dan Iran, yang dilanjutkan dengan negosiasi antara Iran dan

kelompok P5+1. Negosiasi kembali berlanjut sampai akhir Maret 2015, namun tidak memberikan hasil apapun. Pada tanggal 2 April 2015 dalam sebuah konferensi pers bersama sebuah kesepakatan kerangka kerja telah dipresentasikan yang akan menjadi dasar kesepakatan komprehensif selesai pada tanggal 30 Juni. Namun, tenggat waktu 30 Juni telah berlalu dan kembali berlanjut sampai 7 Juli. Negosiasi dan penyusunannya berlanjut sampai 14 Juli 2015, Akhirnya Mogherini dan Zarif mengeluarkan sebuah pernyataan bersama secara resmi di mana mereka menggariskan parameter kesepakatan nuklir akhir yang disepakati oleh Iran dan P5 +1. *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* ditandatangani di Wina. Tantangan utama adalah untuk mendamaikan posisi yang berbeda dari AS dan Iran. Ketidakpercayaan di antara keduanya telah mempengaruhi rincian rancangan kesepakatan.

Tim perunding Uni Eropa yang dipimpin oleh Perwakilan Tinggi dan wakilnya, berperan penting dalam mencapai kesepakatan akhir. Ashton diberi gambaran dari "nol menjadi pahlawan" dengan adopsi JPOA yang berhasil sehingga dijuluki "Ashton Accord", mendapatkan pujian dari John Kerry dan Javad Zarif. Sebagai perwakilan terpilih dari enam negara paling kuat di dunia, Ashton bermain sebagai "Peran terpenting dalam diplomasi dunia" dengan "menegosiasikan solusi untuk salah satu masalah paling berbahaya dan kompleks di dunia". Penggantinya, Federica Mogherini membujuknya untuk tetap terlibat dalam pembicaraan tersebut sebagai perwakilan Uni Eropa untuk mempertahankan "kontinuitas diplomatik" dan penasihat khusus untuk Mogherini.

Tim negosiasi Uni Eropa terdiri dari tujuh atau delapan orang. EURATOM juga memainkan peran dalam negosiasi. Penasihat khusus Nathalie Tocci menyatakan, bahwa “Pena itu ada di tangan tim Uni Eropa". Tim Uni Eropa merancang proposal agar dapat menjembatani secara teknis guna membawa posisi yang berbeda ke posisi lebih dekat sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perundingan

tersebut. Dengan demikian, tim Uni Eropa menyusun kesepakatan. Mengingat bahwa perwakilan tinggi Uni Eropa secara resmi memimpin perundingan dan bahwa tindakan Uni Eropa sangat penting dalam membawa Iran ke meja perundingan menunjukan kemampuan Uni Eropa untuk mempengaruhi hasil perundingan secara signifikan. Selain itu, gagasan negosiasi diplomatik multilateral sebagai format pilihan untuk menyelesaikan masalah seperti ini adalah kampanye yang benar-benar diberikan oleh Uni Eropa.

Melalui proses diplomasi dengan menggunakan multilateralisme yang efektif sebagai landasan strategi Eropa untuk memerangi proliferasi WMD, Uni Eropa berkomitmen pada sistem perjanjian multilateral yang memberikan dasar hukum dan normatif untuk semua upaya non-proliferasi. Kebijakan Uni Eropa adalah untuk mengejar implementasi dan universalisasi norma perlucutan senjata dan non-proliferasi yang ada. Uni Eropa telah berhasil menyusun sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini dimungkinkan karena semua pihak yang terlibat siap menerima Uni Eropa sebagai bagian yang memimpin negosiasi. Uni Eropa bisa mengatur agenda. Disisi lain juga, dengan Uni Eropa menjunjung tinggi nilai multilaterisme yang efektif sebagai landasannya memberikan kepercayaan bagi seluruh pihak bahwa Uni Eropa adalah pihak yang independen dan terpercaya.

C. PENCAPAIAN UNI EROPA TERHADAP PROLIFERASI NUKLIR IRAN

Perundingan antara kelompok P5+1 dan Iran sempat stagnan selama beberapa tahun, meskipun ada sejumlah proposal yang diberikan sebagai upaya penyelesaian melalui negosiasi serta langkah-langkah lain yang ditempuh guna membangun kepercayaan. Kelompok P5+1 meningkatkan eskalasi perundingan pada tahun 2013 dalam konteks diplomasi didukung dengan terpilihnya Hassan Rouhani sebagai Presiden pada bulan Juni 2013.

Melalui beberapa pertemuan perundingan negosiasi yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok P5+1 dan Iran berhasil mencapai kemajuan yang positif dengan menghasilkan 2 kesepakatan. Kesepakatan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2013-2015. P5+1 yang kemudian difasilitasi oleh Uni Eropa telah terlibat dalam negosiasi serius dan substantif dengan Iran dengan tujuan mencapai resolusi diplomatik yang dapat memastikan bahwa Iran dari mendapatkan senjata nuklir. Tercapainya kesepakatan yang kemudian diberi nama Joint Plan of Action dan Joint Comprehensive Plan of Action.

Tujuan dilakukannya negosiasi tersebut untuk mencapai sebuah kesepakatan yang disepakati bersama guna memperoleh solusi komprehensif baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Melalui kesepakatan ini diharapkan dapat memastikan program nuklir Iran secara eksklusif bersifat damai. Iran juga menegaskan kembali bahwa dalam kondisi apapun Iran tidak akan pernah mencari atau mengembangkan senjata nuklir. Solusi komprehensif ini akan membangun langkah awal dan menghasilkan langkah akhir untuk periode yang akan disepakati melalui penyelesaian masalah. Solusi komprehensif ini akan memungkinkan Iran untuk sepenuhnya menikati haknya atas energi nuklir untuk tujuan damai berdasarkan pasal-pasal NPT yang relevan sesuai dengan kewajiban di dalamnya.

Solusi komprehensif ini akan melibatkan program pengayaan yang didefinisikan secara bersama dengan batas praktis dan langkah-langkah transparansi untuk memastikan sifat program yang damai. Solusi komprehensif ini merupakan keseluruhan yang terpadu dimana tidak ada kesepakatan sampai semuanya disetujui. Solusi komprehensif ini melibatkan proses langkah demi langkah dan akan menghasilkan pencabutan menyeluruh atas semua sanksi Dewan Keamanan PBB, serta sanksi multilateral dan nasional yang terkait dengan program nuklir Iran.

P5+1 akan bertanggung jawab atas kesimpulan dan implementasi langkah-langkah jangka panjang yang saling menguntungkan dan solusi komprehensif dengan itikad baik. Dalam prosesnya, Komisi bersama yang terdiri dari kelompok P5+1 bersama Iran akan dibentuk untuk memantau pelaksanaan keseluruhan langkah-langkah dan mengatasi masalah yang mungkin timbul, dengan IAEA bertanggung jawab atas verifikasi tindakan terkait nuklir. Sedangkan Komisi bersama akan bekerja sama dengan IAEA untuk memfasilitasi penyelesaian masalah masa lalu dan masa kini.

1. Joint Plan of Action (JPOA)

Joint Plan of Action (*JPOA*) merupakan perjanjian terobosan sementara yang ditandatangani pada 24 November 2013. JPOA menetapkan berbagai syarat dan ketentuan untuk kesepakatan tahap pertama. Kemudian dua bulan kemudian P5 +1 yang kembali dikoordinasikan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa bersama Iran mencapai pemahaman awal yang digariskan dalam Rencana Aksi Bersama (JPOA).

Fase enam bulan pertama dari JPOA mensyaratkan pembekuan sebagian besar program nuklir Iran, termasuk pembangunan, pengolahan ulang dan pengayaan di atas 5%, mencampur habis uranium yang diperkaya menjadi 20% dan mengurangi stok uranium yang diperkaya rendah, serta meningkatkan verifikasi dan pemantauan oleh IAEA.

JPOA mewajibkan Iran dan kelompok P5+1 untuk mengambil langkah-langkah spesifik sementara para negosiator menangani kesepakatan komprehensif. Sebuah dokumen yang terdiri atas empat halaman yang disepakati oleh P5+1 dan Iran kemudian dikomunikasikan ke IAEA. JPOA bertujuan untuk memastikan sifat damai program nuklir Iran yang berjangka panjang melalui sebuah pendekatan singkat (Langkah Pertama) dan paruh waktu (Final Step). Hasil draft dari JPOA akan dikelola oleh Komisi Bersama P5+1 dan Iran serta dibawah pengawasan oleh IAEA.

Unsur-unsur langkah pertama akan terikat waktu dengan durasi 6 bulan dan dapat diperbaharui dengan persetujuan bersama di mana semua pihak akan berupaya untuk mempertahankan suasana yang konstruktif untuk negosiasi dengan itikad baik. Dalam periode ini terdapat beberapa point yang salah satunya komitmen Iran untuk tidak akan memperkaya uranium lebih dari 5% selama 6 bulan. Sedangkan dari pihak kelompok P5+1, dimana Amerika dan Uni Eropa akan menangguhkan sebagian sanksi serta tidak adanya sanksi baru yang akan diberikan Dewan Keamanan PBB.

Unsur-unsur dari solusi akhir yang komprehensif dimana para pihak baik kelompok P5+1, Iran, dan IAEA bertujuan untuk menyimpulkan negosiasi dan mulai menerapkan komitmen yang telah disepakati tidak lebih dari satu tahun setelah adopsi dokumen ini. Dengan kata lain, terbukanya perundingan kembali untuk menghasilkan kesepakatan baru yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang sehingga dapat disepakati serta menerapkan sepenuhnya langkah-langkah transparansi dan pemantauan yang disempurnakan agar dapat meratifikasi dan melaksanakan Protokol Tambahan, sesuai dengan peran parlemen Iran.

Di bawah JPOA sebagai pengganti komitmen Iran untuk menempatkan batasan yang berarti pada program nuklirnya, P5 +1 berkomitmen untuk memberikan bantuan sanksi sementara dan terbatas kepada Iran. Periode tersebut ditetapkan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Pada tanggal 2 April 2015 sebuah kesepakatan tentatif yang diumumkan sebagai parameter untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action / JCPOA). P5 +1 bersama dengan Uni Eropa dan Iran memutuskan pada 30 Juni 2015 untuk memperpanjang JPOA selama tujuh hari sampai 7 Juli 2015 untuk melanjutkan negosiasi guna mencapai solusi yang komprehensif.

2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

Pada 14 Juli 2015, Iran dan kelompok P5 + 1 bersama dengan Uni Eropa mengumumkan penyelesaian sebuah perjanjian nuklir komprehensif yang dikenal sebagai *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).* Dokumen komprehensif yang dihasilkan dari hampir dua tahun perundingan internasional yang intens serta 13 tahun setelah aktivitas nuklir rahasia Iran. JCPOA berisi dokumen yang panjang dan rumit termasuk kesepakatan utama dan terdiri atas lima lampiran.

Untuk mendukung dan mengoperasionalkan JCPOA, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2231 pada tanggal 20 Juli 2015 yang berisi dua lampiran. Beberapa dokumen yang relevan dengan keseluruhan kesepakatan tersebut tidak bersifat publik termasuk kesepakatan sisi antara P5+1 mengenai tindakan PBB di masa depan dalam waktu 10 tahun dan isi rencana pengayaan dan pengayaan pengayaan dan pengayaan Iran, yang akhirnya akan diserahkan Iran ke IAEA.

Jika berkaca dari dokumen JPOA yang telah dihasilkan sebelumnya, JPOA menyatakan bahwa JCPOA akan memasukkan program pengayaan "yang didefinisikan secara timbal-balik [Iran] dengan batas-batas praktis dan langkah-langkah transparansi untuk menjamin sifat damai program tersebut". Secara khusus, Iran dan P5+1 dalam JCPOA mencapai kesepakatan mengenai bantuan sanksi permanen dan komprehensif dengan imbalan pembatasan untuk periode yang disepakati pada lingkup dan tingkat kegiatan pengayaan berupa kapasitas dan lokasi fasilitas pengayaan serta ukuran komposisi stok uranium yang diperkaya oleh Iran.

Dokumen JCPOA bukan merupakan perjanjian internasional namun merupakan kesepakatan antar pemerintah yang rumit dengan bagian integral dalam lampiran teknis. Lampiran-lampiran ini menjelaskan perubahan program nuklir Iran, mekanisme untuk mencabut sanksi, bidang kerjasama

nuklir, pembentukan Komisi Bersama , dan sebuah rencana kesepakatan untuk pelaksanaan keseluruhan. Sejalan dengan JCPOA, Iran menandatangani sebuah peta jalan kerjasama yang terpisah dengan IAEA untuk menjelaskan kemungkinan dimensi militer dari programnya di masa lalu. Semua kesepakatan ini diperkuat dengan persetujuan resolusi khusus Dewan Keamanan PBB. Intinya adalah batasan bertahap pada infrastruktur nuklir Iran sebagai imbalan atas penghapusan sanksi ekonomi. Hal ini adalah kesepakatan pertama yang sebagiannya memerlukan pengawasan dan inspeksi yang tinggi. Pembahasan dalam dokumen JCPOA juga mencakup program nuklir lanjutan.

JCPOA membatasi pengayaan uranium Iran untuk jangka waktu yang tetap. Kesepakatan tersebut mengharuskan IAEA untuk menyatakan bahwa Iran telah menyelesaikan sebagian besar tugas yang telah diuraikan dalam dokumen tersebut agar Iran dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan sanksi pada periode *"Implementation Day"*. Menurut JCPOA, berakhirnya pembatasan pengayaan JCPOA akan diikuti oleh evolusi bertahap dengan kecepatan yang wajar dari program pengayaan Iran. Uni Eropa juga dapat berfungsi sebagai perantara diplomatik untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB + Jerman atau kelompok P5+1 dan Iran, menyeimbangkan pendekatan dual-track ekonomi tekanan dan dialog politik, dan menjadi perantara Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action / JCPOA) pada tanggal 14 Juli 2015.

Dalam pelaksanaannya JCPOA membentuk Komisi Bersama untuk memantau kesepakatan nuklir tersebut. Komisi Bersama terdiri dari perwakilan P5 + 1 dan Iran. Komisi tersebut akan mencakup setidaknya empat Kelompok Kerja yang fokus pada pengadaan, pengangkatan sanksi, modernisasi Arak, dan masalah teknis. Komisi Bersama juga memiliki wewenang untuk meninjau dan menyetujui berbagai tindakan nuklir, seperti rencana akhir untuk merancang ulang reaktor riset air berat Arak dan permintaan Iran untuk mendapatkan

jenis sel panas tertentu, menguji jenis alat sentrifugal baru, atau mulai penelitian tentang bahan bakar logam uranium untuk Reaktor Riset Tehran.

Ditugaskan sebagai salah satu peserta dan koordinator Komisi Bersama, Uni Eropa memainkan peran utama dalam mengawasi pelaksanaan JCPOA. Uni Eropa melalui Perwakilan Tinggi dan didukung oleh European External Action Service (EEAS) juga diberi tugas untuk mengkoordinasikan dua kelompok kerja, satu untuk pengadaan dan satu lagi dalam pelaksanaan pengangkatan sanksi. Otoritas diplomatik Uni Eropa diformalkan dalam persyaratan hukum internasional ketika Dewan Keamanan PBB menyetujui JCPOA dalam Resolusi 2231 (2015) dan mendesak pelaksanaannya secara penuh pada jadwal yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut.

JCPOA menetapkan bahwa Komisi Bersama akan bertemu setiap tiga bulan dan setiap saat atas permintaan peserta JCPOA kepada Koordinator di New York, Wina atau Jenewa, merahasiakan kerahasiaan pertemuan. Satu-satunya jejak dari lima pertemuan yang telah terjadi sejak berlakunya JCPOA adalah pernyataan yang dipublikasikan di situs EEAS dan sembilan dokumen Komisi Bersama yang dipublikasikan di situs IAEA sebagai klarifikasi substansi JCPOA dan fungsi Joint Komisi itu sendiri.

Pernyataan publik tersebut menunjukkan bahwa empat dari lima pertemuan tersebut diadakan di tingkat direktur politik negara-negara peserta JCPOA, yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal EEAS Helga Schmid dan satu di tingkat menteri yang diketuai oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini di konteks Majelis Umum PBB. Pernyataan ini juga menggambarkan kemampuan Uni Eropa untuk mengumpulkan keahlian teknis, legal dan diplomatik yang diperlukan untuk menerapkan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh JCPOA.

Peran Uni Eropa sebagai penjamin utama JCPOA menjadi jelas berkenaan dengan keberlangsungan kesepakatan akibat kontaminasi oleh isu-isu eksternal seperti pertanyaan

tentang peran Iran dalam konflik regional dan penerapan sanksi AS terhadap program rudal balistik Iran. Uni Eropa telah memainkan peran multilateralnya sebagai koordinator sampai penuh, sebagai pihak yang mengadakan rapat, *compliance-checker*, juru bahasa, mediator dan konsiliator hukum, yaitu wali amanat JCPOA. Dua tahun sejak penandatanganan JCPOA tidak ada bukti bahwa peserta Komisi Bersama lainnya tidak menghargai peran UE sebagai koordinator. Uni Eropa telah menunjukkan kemampuannya untuk mengumpulkan keahlian teknis, legal dan diplomatik yang dibutuhkan untuk menerapkan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh JCPOA.

Setelah kesepakatan internasional yang dicapai, langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi penuh JCPOA. Uni Eropa memainkan peran di tiga bidang pelaksanaan: mengangkat sanksi, verifikasi (melalui partisipasi dalam Joint Commission) dan kerja sama nuklir sipil. Lampiran V dari JCPOA merinci jadwal pelaksanaannya yang dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama pada Hari Finalisasi (14 Juli 2015), Iran dan Kelompok P5+1 mendukung JCPOA dan merujuknya ke DK PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi, di mana DK PBB juga mendukung JCPOA (ini dilakukan dengan Resolusi DK PBB 2231 pada tanggal 20 Juli 2015). Uni Eropa juga mendukung Resolusi tersebut.

Tahapan kedua pada Hari Adopsi (18 Oktober 2015) menandai berlakunya JCPOA di semua negara bagian yang terlibat. Semua peserta diminta untuk membuat persiapan termasuk persiapan hukum dan administratif sebagai pelaksanaan komitmen JCPOA mereka. Uni Eropa mengadopsi tindakan hukum yang mengatur pencabutan semua sanksi ekonomi dan keuangan Uni Eropa yang terkait nuklir seperti yang ditentukan dalam JCPOA yang berlaku pada tahapan ketiga dari kesepakatan JCPOA yaitu Hari Implementasi bersamaan dengan pelaksanaan yang diverifikasi IAEA oleh Iran mengenai tindakan terkait nuklir yang disepakati.

Tahapan keempat pada Hari Transisi dimana 8 tahun setelah kesepakatan JCPOA disepakati dan dilaksanana atau setelah IAEA mencapai kesimpulan yang lebih luas dengan memastikan bahwa semua bahan nuklir di Iran tetap dalam konteks kegiatan damai. Tahapan terakhir yaitu Hari Penghentian berlaku 10 tahun, dimana dimungkinkan semua tindakan sanksi Uni Eropa yang tersisa akan dihentikan. Uni Eropa sejauh ini menghormati komitmennya yang ditentukan dalam Lampiran V JCPOA mengenai sanksi.

Organisasi Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk verifikasi penggunaan bahan nuklir, EURATOM hanya memiliki kewenangan di dalam kawasan Uni Eropa yang berhubungan secara bilateral mengenai sanksi-sanksi Uni Eropa dan Iran sehingga tidak disebutkan dalam JCPOA oleh karena itu tidak terlibat dalam verifikasi. Sebaliknya, Uni Eropa terlibat dalam verifikasi melalui partisipasi dalam Komisi Bersama yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan JCPOA. Fungsinya dijelaskan dalam Lampiran IV: “Mengkaji ulang dan menyetujui kegiatan nuklir Iran; meninjau dan berkonsultasi untuk menangani masalah-masalah mengenai pencabutan sanksi; dan meninjau dan menangani masalah apa pun yang diyakini oleh peserta JCPOA sebagai bentuk ketidakberhasilan oleh peserta JCPOA lainnya atas komitmennya di bawah JCPOA".

Uni Eropa terlibat dalam posisi tertinggi Komisi Bersama melalui Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, atau wakilnya yang ditunjuk akan bertindak sebagai Koordinator Komisi Bersama. Perwakilan Tinggi juga bertugas sebagai Koordinator Kelompok Kerja Pengadaan, sebuah saluran pengadaan yang bertujuan untuk mengijinkan pengalihan bahan nuklir dan non-nuklir untuk menguntungkan program nuklir Iran. Selanjutnya, Perwakilan Tinggi menjabat sebagai Koordinator Kelompok kerja penerapan pengangkatan sanksi. Uni Eropa memainkan peran sentral dalam mekanisme penyelesaian sengketa, sebagai pemimpin sekaligus mediator. Mediasi dan mencapai konsensus tersebut merupakan proses yang sangat penting.